

## ANALISIS APBD KABUPATEN / KOTA JAWA TIMUR

Aang Afandi<sup>1</sup>, Andi Kusuma Indrawan<sup>2</sup>, & Basuki Rachmat<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno Hatta No 9 Malang

Telp. 0341-404424

E-mail: [aang\\_95@yahoo.co.id](mailto:aang_95@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Analisis Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah secara umum akan di analisis oleh masing – masing daerah untuk kepentingan perencanaan tahun berikutnya ataupun kepentingan – kepentingan lainnya. Untuk mempermudah proses analisis tersebut, maka menggunakan alat alat visualisasi yang mudah, menarik dan mudah dipahami. Salah satu alat visualisasi tersebut adalah menggunakan *Tableau Public*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah di Jawa Timur dalam upaya menggali potensi pendapatannya, berikutnya mengidentifikasi pola belanja pemerintah daerah di Jawa Timur dan mengetahui efektivitas pemanfaatan *Tableau Public* sebagai perangkat lunak untuk menyajikan visualisasi data dan alat bantu analisis visual. Penelitian ini menggunakan data dengan periode waktu tujuh tahun, yakni tahun 2010 – 2016 dengan menggunakan seluruh populasi kabupaten/kota di Jawa timur, yakni 38 kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan daerah di 38 daerah di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang memadai, pertumbuhan ini didukung dari pertumbuhan PAD dan Dana perimbangan. Belanja daerah pun juga mengalami pertumbuhan mengikuti kemampuan daerah. Sementara itu sampai dengan tahun 2016, masih terjadi defisit belanja. Namun demikian daerah secara umum telah melakukan penyertaan modal, walaupun masih dalam persentase yang relatif kecil.

*Kata Kunci: APBD (Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah), Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Surplus/Defisit*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah atau APBD adalah sebuah bagian dari proses perencanaan dan penganggaran. APBD memiliki keterkaitan dengan APBN yang di anggarkan oleh pemerintah pusat. Keterkaitannya adalah pada penerimaan daerah masih bergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja yang ideal, mestinya memiliki keterkaitan dengan penerimaan yang mampu dicapai oleh suatu daerah. Dengan kata lain, pola belanja mestinya seimbang dengan pola penerimaan. Dengan kata lain tidak mengalami defisit ataupun defisit dalam jumlah yang besar. Walaupun dimungkinkan pula sebenarnya pemerintah daerah dapat membiayai defisitnya melalui mekanisme tertentu, walaupun hal itu menjadi tidak menarik untuk dilakukan.

Dengan demikian ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran sekaligus pengelolaannya. Untuk itu maka analisis perlu dilakukan bagi pemerintah daerah untuk mencermati sejauh mana kemampuan pemerintah daerah menggali potensi – potensi penerimaannya, mengelolanya dengan baik dan berupaya untuk membelanjakan pula dengan tepat. Analisis yang dilakukan ini berbasis pada penggunaan *tableau public* sebagai sebuah perangkat lunak yang relatif baru, yang relatif mudah digunakan dan memiliki berbagai kelebihan.

### 1.2. Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah di Jawa Timur dalam upaya menggali potensi pendapatannya.
- 2) Mengidentifikasi pola belanja pemerintah daerah di Jawa Timur.

## 2. TELAAH TEORI

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 2007, hal. 11) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004, hal. 6) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1984, hal. 271) bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara – cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

## 2.1. Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP dimaksudkan sebagai upaya pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu, RKP tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa RKPmenjadipedomanpenyusunanRAPBN dan RKPdmenjadipedomanpenyusunanRAPBD. Pada pasal 26 menjelaskan bahwa RKPditetapkandenganPeraturanPresiden sedangkan RKPditetapkandenganPeraturanKepalaDaerah.

## 2.2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pada awalnya Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan Rencana Pembangunan Daerah meliputi: (1) RPJPD, (2) RPJMD dan (3) RKPd. Tahapan penyusunannya yaitu: (1) Penyusunan Rancangan Awal, (2) Pelaksanaan Musrenbang, (3) Perumusan Rancangan Akhir dan (4) Penetapan Rencana.

Rencanakerjadanpendanaansertaprakiraanmajudenganmempertimbangkan kerangkapendanaanpaguindikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBDuntuk tahun-tahun berikutnya dari tahunanggaran yang direncanakan.

Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitukebijakan,programdan kegiatanpemerintahdaerah yang didanai APBDdalam pencapaiansasarannya,melibatkanperansertamasyarakat baik dalambentuk dana, material maupun sumber daya manusia danteknologi.

## 2.5. Penganggaran Daerah dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Oleh karena itu, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

**Asas Umum Anggaran.** Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah yang bersangkutan dan tentunya harus memperhatikan asas umum APBD sebagai berikut:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- 2) Penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
- 6) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 7) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- 8) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 10) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- 11) Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**Prinsip Disiplin Anggaran.** Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum anggaran, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

### 3. METODE

#### 3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang Analisis Anggaran Penerimaan & Belanja Daerah Tahun 2010 – 2016 di Propinsi Jawa Timur Menggunakan Tableau Public Sebagai Alat Analisis & Penyajian Data akan membahas tentang bagaimana pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja, sekaligus mereview dan mengevaluasi pemanfaatan anggaran selama ini.

#### 3.2. Data dan Sumber Data

Pada penelitian yang dilakukan ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPK) atau [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), berupa data – data time series kuantitatif yang didukung beberapa data kualitatif dari situs yang sama yang nantinya dapat dikomparasikan dengan data BPS dan didukung dari situs resmi pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni teknik untuk memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dokumen – dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3.4. Metode Analisis dan Tahapan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, maka metode analisis dan tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi data kuantitatif yang berasal dari situs terpilih.
- 2) Menganalisis dengan menggunakan visualisasi *tableau public*.
- 3) Menganalisis kualitatif disertai data data kualitatif terpilih.
- 4) Rekomendasi kebijakan.

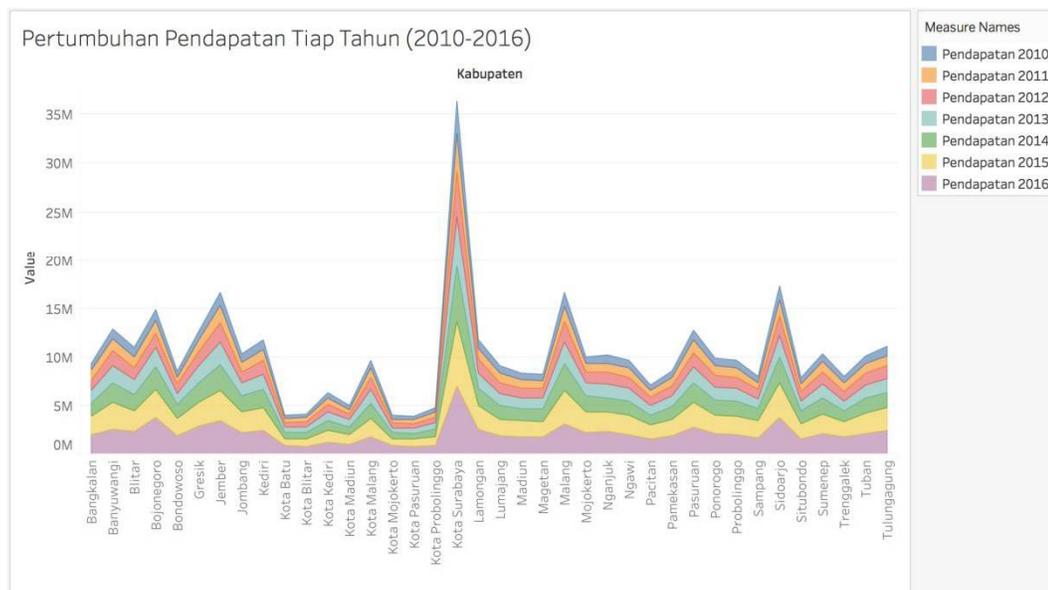
Sedangkan indikator – indikator yang dianalisis pada penelitian ini adalah:

- 1) Pendapatan, dengan tahapan: a) mengidentifikasi struktur pendapatan daerah; b) mencermati tren pendapatan daerah lima tahun terakhir; dan c) menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Belanja, dengan tahapan: a) menganalisis struktur belanja daerah, b) mencermati tren belanja daerah; c) menganalisis Pertumbuhan Belanja dan Belanja Perkapita.
- 3) Pembiayaan, dengan tahapan: a) mencermati posisi surplus / defisit anggaran; b) mencermati Silpa dan besaran silpa.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Pendapatan

Pendapatan pada APBD Kabupaten dan Kota secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan 2016. Pertumbuhan tersebut rata – rata per-tahunnya berada pada rentang 11% sampai 24%. Rata – rata pertumbuhan pendapatan terendah adalah Kota Kediri (11,9%) dan pertumbuhan tertinggi per tahun terjadi di Kabupaten Bojonegoro (24,6%).



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

**Gambar 1. Pertumbuhan Pendapatan 2010 -2016**

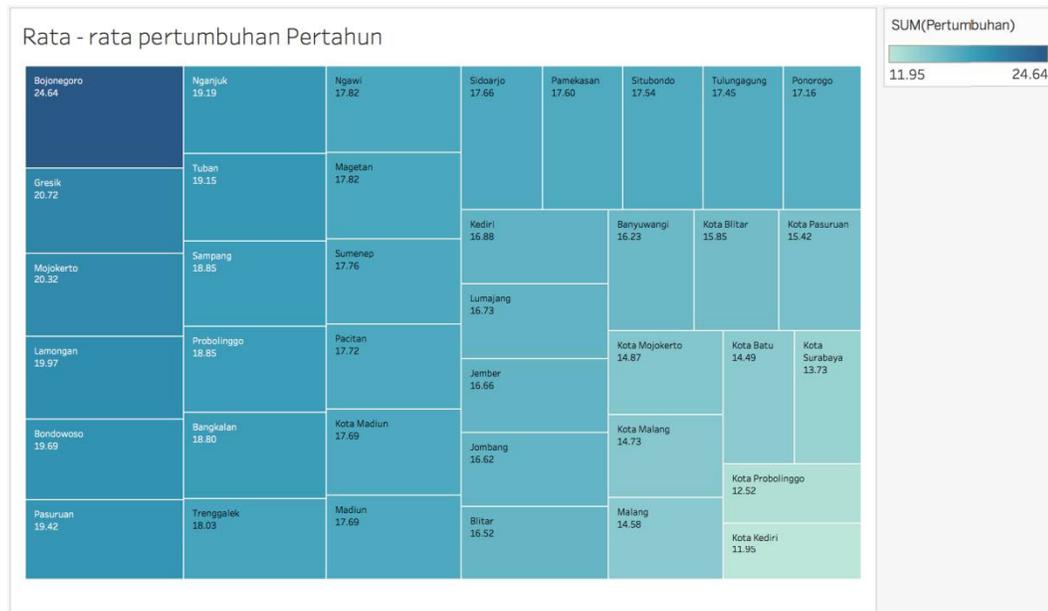
#### Cluster Pertumbuhan

Cluster pertumbuhan pendapatan dibagi dalam lima cluster. Cluster 1 (satu) berwarna biru dengan titik sentral sebesar 19,495 terdapat 10 kabupaten kota yang berada pada cluster ini. Cluster 2 (dua) berwarna oranye terdapat 18

Kabupaten/kota dengan titik sentral sebesar 17,31. Berikutnya *cluster* 3 (tiga) berwarna merah terdapat 1 kabupaten dengan titik sentral sebesar 24,63, pada *cluster* 4 (empat) berwarna biru muda terdapat 6 kabupaten/kota dengan titik sentral sebesar 14,991 dan terakhir *cluster* 5 (lima) berwarna hijau terdapat 3 kabupaten dengan titik sentral sebesar 12,731.

### Rata – Rata Pertumbuhan

Dengan menggunakan visualisasi *Tableau*, dapat ditunjukkan wilayah – wilayah yang pertumbuhannya tinggi, dengan digambarkan kotak dengan ukuran yang besar warna berbeda dan bisa dimunculkan nama kab/kota dan besaran pertumbuhannya.



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

Gambar 2. Rata rata pertumbuhan Per tahun

### Struktur Pendapatan

Dengan menggunakan visualisasi *Tableau*, dicoba dipetakan persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan. Berbasis peta Jawa Timur maka tampak titik – titik kabupaten/kota di Jawa Timur. *Tableau* versi ini masih belum mampu membedakan antara kabupaten dan kota. Sehingga yang dilakukan oleh peneliti adalah memasukkan *latitude* dan *longitude* ibukota kabupaten di mana yang kota tersebut juga berstatus sebagai “kota”, contohnya misal Blitar, kota Blitar sebagai Kota, sedangkan Kabupaten Blitar berada pada titik di Kecamatan Kanigoro sebagai ibukota Kabupaten Blitar.

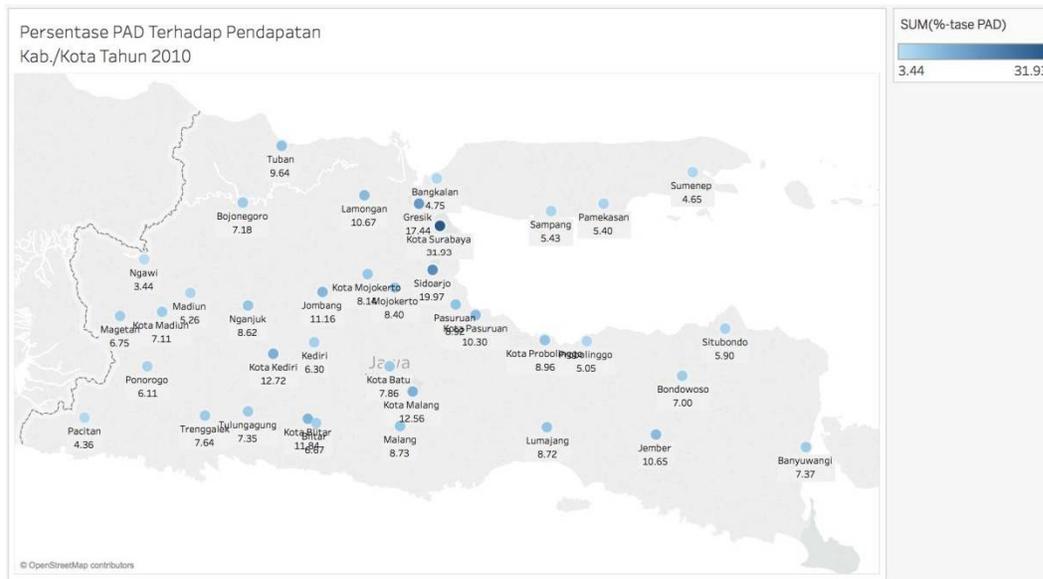
Warna hijau muda menandakan persentase dana perimbangan yang rendah, sementara itu warna hijau semakin tua menandakan besarnya persentase dana perimbangan yang semakin besar. Beberapa kabupaten dengan persentase tinggi di antaranya adalah Kabupaten Sumenep (93,17%), Kabupaten Sampang (90,49%) dan Kabupaten Pacitan (91,08%).



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

**Gambar 3. Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Tahun 2010**

Selanjutnya dengan cara yang sama, memetakan besaran PAD memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tua warna titik (ke arah biru tua) maka kontribusi PAD semakin besar. Dari ilustrasi visualisasi, tampak di Jawa Timur tidak banyak kabupaten kota yang mampu memberikan kontribusi PAD yang tinggi. Hanya ada beberapa kabupaten saja yakni: Kota Surabaya (31,92%), Kabupaten Sidoarjo (19,97%) dan Gresik (17,74%).



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

**Gambar 4. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2010**

**Analisis Pertumbuhan Struktur Pendapatan**

Rata – rata pertumbuhan pendapatan per tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebesar 11,95% sampai dengan 24,64 dengan nilai median 17,63%. Sedangkan rata – rata pertumbuhan daerahnya sebesar 17,35%. Lima daerah dengan rata – rata pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Bondowoso (19,69%), Kabupaten Lamongan (19,97%),

Kabupaten Mojokerto (20,32%), Kabupaten Gresik (20,72%), dan Kabupaten Bojonegoro (24,64%). Kelima daerah ini, ternyata 3 daerah juga ditopang dengan pertumbuhan PAD yang tinggi yakni Kabupaten Mojokerto (93,02%), Kabupaten Gresik (79,11%), dan Kabupaten Bojonegoro (49,56%). Sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 24,48% berada di Kota Kediri, tertinggi sebesar 93,02 berada di Kabupaten Mojokerto dan rata – rata pertumbuhan sebesar 49,3%. Untuk rata – rata pertumbuhan dana perimbangan per tahun dari tahun 2010 – 2016 berada pada rentang 0,25% - 37,40%, terendah pada kota Surabaya dan tertinggi pada Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan rata – rata 38 daerah adalah sebesar 18,38%. Pertumbuhan dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro ini adalah berasal dari keberadaan tambang – tambang minyak bumi baru yang ada di Bojonegoro. Sementara itu pertumbuhan lain – lain pendapatan yang sah pada tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebesar 110%. Dengan rentang sebesar 0,24% sampai dengan 477%.

**Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan, PAD, Dana Perimbangan & Lain – Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2010 - 2016**

Kabupaten	Pert. Pend.	Kategori	Pert. PAD/th	Kategori	Pert. Daper/th	Kategori	Pert. LL/th	Kategori
Bondowoso	19.69	tinggi	32.93	rendah	24.67	tinggi	105.83	tinggi
Lamongan	19.97	tinggi	39.52	rendah	16.38	rendah	253.73	tinggi
Mojokerto	20.32	tinggi	93.02	tinggi	21.08	tinggi	132.97	tinggi
Gresik	20.72	tinggi	79.11	tinggi	19.14	tinggi	84.25	tinggi
Bojonegoro	24.64	tinggi	49.56	tinggi	37.40	tinggi	111.11	tinggi
Median	17.63		48.66		18.33		82.55	
Minimum	11.95		24.48		0.25		0.24	
Maximum	24.64		93.02		37.40		477.61	
Average	17,35		49,30		18,13		110,18	

#### **Belanja Daerah Tahun 2010 – 2016**

Dari pendapatan yang diterima daerah, maka akan dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam 6 tahun terakhir tampak memberikan gambaran bahwa secara umum secara nominal menunjukkan besarnya pertumbuhan belanja di setiap kabupaten. Pada visualisasi yang pertama, menunjukkan besarnya pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan 2016.

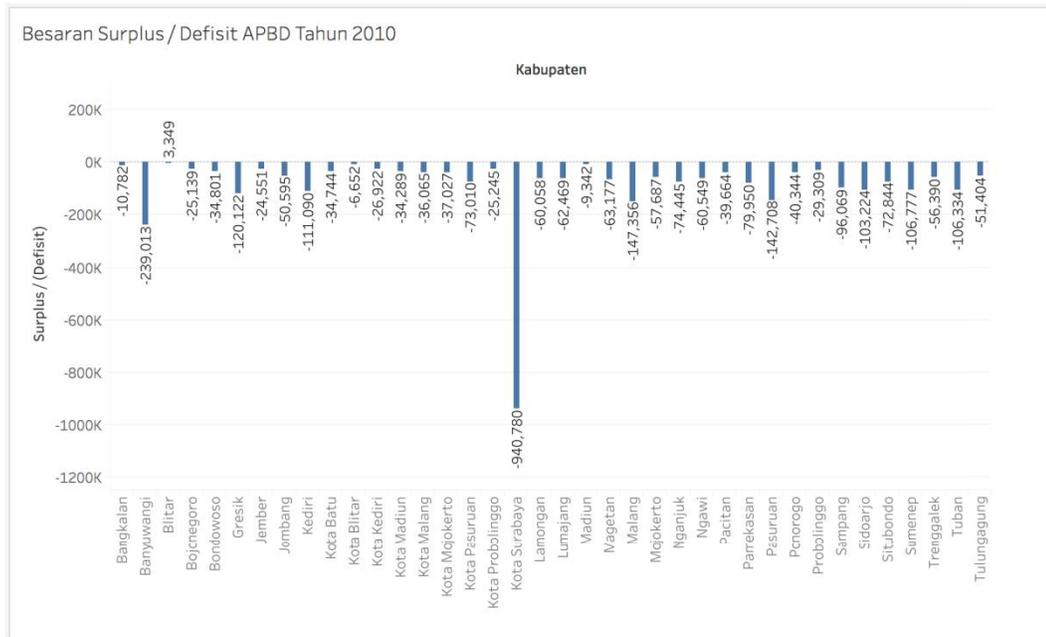
Sementara itu, gambar kedua memvisualisasikan perkembangan pada tahun 2011, 2013 dan 2016. Pada grafik tersebut, menggambarkan warna biru muda pada tingkatan kedua di tengah, menandakan besaran belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tahun 2010. Sedangkan pada Gambar ketiga, lebih jelas lagi perbedaan antara belanja tahun 2010 (direpresentasikan grafis warna biru) dengan belanja tahun 2016 yang direpresentasikan grafis warna ungu. Tampak jelas perbedaan secara nominal belanja tahun 2010 dengan belanja tahun 2016. Di mana belanja daerah tahun 2016 secara umum lebih besar dibandingkan tahun 2010.

#### **Struktur Belanja Daerah**

Belanja daerah, dibagi menjadi dua, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika dicermati, struktur belanja langsung di Kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada rentang 18% sampai dengan 66,88%. Dengan persentase belanja langsung yang tinggi maka menunjukkan besarnya belanja untuk pembangunan dan layanan pada masyarakat semakin besar. Sebaliknya, jika belanja tidak langsungnya semakin besar, maka menunjukkan besarnya anggaran banyak digunakan untuk pembiayaan aktivitas rutinnya, salah satunya dipergunakan untuk

Persentase belanja langsung tahun 2016 pada kisaran 30,76% sampai dengan 70,67%. Persentase terendah berada di Kabupaten Magetan sedangkan yang tertinggi adalah Kota Mojokerto. Catatan menariknya adalah 9 kota di Jawa Timur termasuk pada 11 tertinggi besaran belanja langsungnya tahun 2016. Ada 2 kabupaten yang masuk pada kategori ini yakni Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Pasuruan.

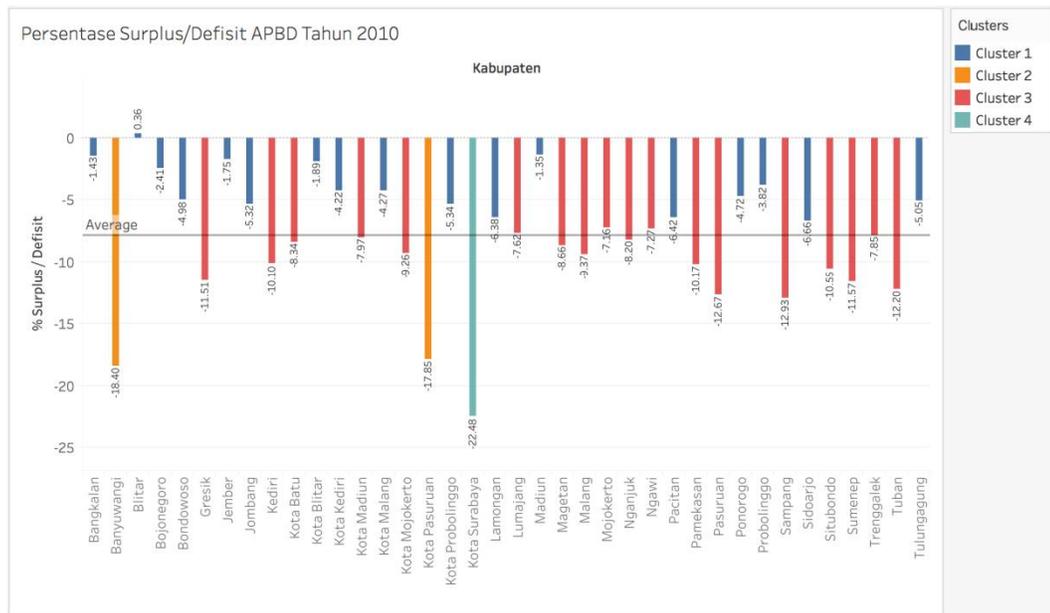
**Surplus/Defisit Belanja APBD**



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

**Gambar 5. Surplus / Defisit APBD Tahun 2010**

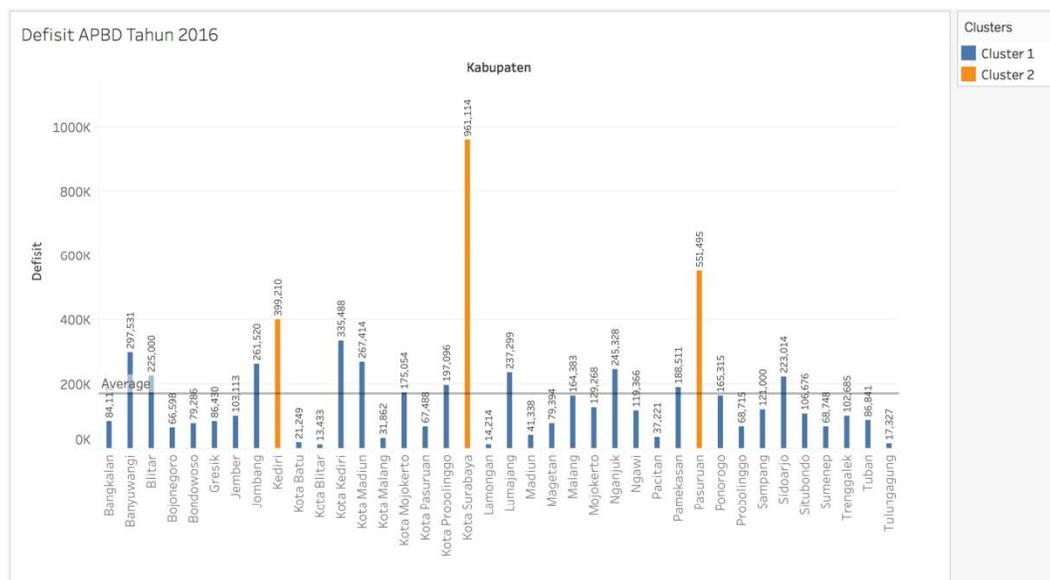
Pada tahun 2010, di Jawa Timur hanya terdapat satu daerah yang APBDnya pada posisi surplus, daerah tersebut adalah Kota Blitar, di mana APBDnya surplus sebesar Rp 3,349 M. Sementara 37 daerah lainnya pada posisi defisit, besaran defisitnya pada rentang Rp 6 M sampai dengan Rp 940 M. Defisit tertinggi terjadi di Kota Surabaya. Secara persentase ternyata kota Surabaya juga menunjukkan sebagai kota dengan tingkat persentase defisit tertinggi yakni mencapai 22,48%. Selanjutnya, pada *cluster* kedua, defisit terbesar kedua, terdapat dua daerah yakni kabupaten Banyuwangi (18,40%) dan Kota Pasuruan (17,85%). Adapun rata – rata besaran defisit APBD tahun 2010 adalah sebesar 7,84%. Di Jawa Timur terdapat 18 daerah dengan defisit di bawah rata – rata dan terdapat satu daerah yang mengalami surplus.



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

Gambar 6. Persentase Surplus / Defisit APBD Tahun 2010

Defisit APBD tahun 2016 pada kisaran Rp 14 M sampai dengan Rp 941 M. Artinya rentang defisit ini cukup beragam. Terdapat tiga daerah berada pada *cluster* kedua, yakni dengan defisit tinggi. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Surabaya defisit Rp 941 M, Kabupaten Pasuruan 551 M dan Kabupaten Kediri sebesar Rp 399 M.

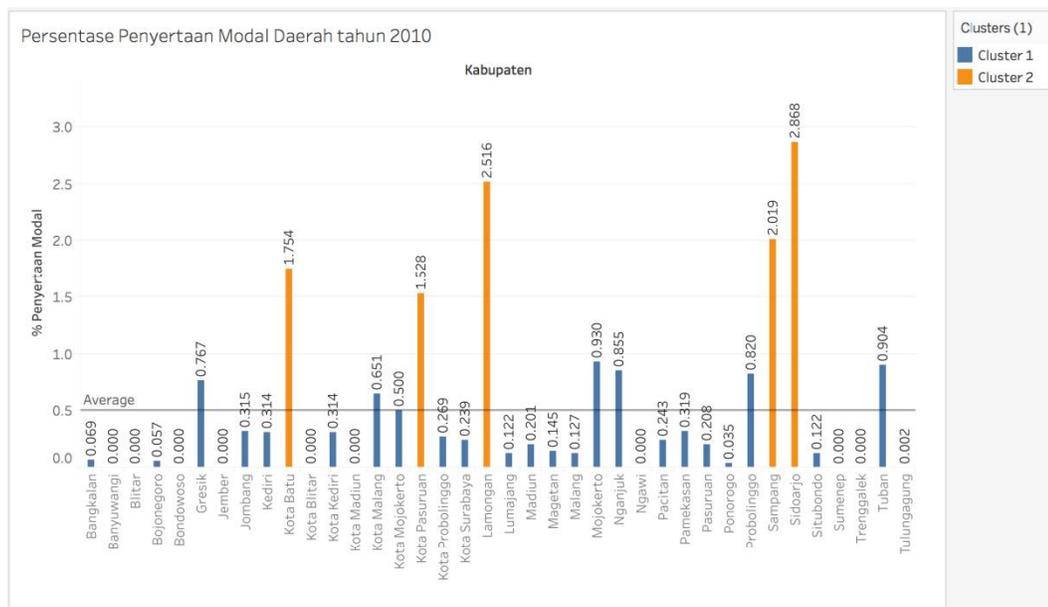


Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

Gambar 7. Defisit APBD Tahun 2016

Jika dicermati, bila secara nominal kota Surabaya memiliki defisit terbesar namun secara persentase Surabaya tidak termasuk sebagai kota dengan persentase defisit tertinggi. Defisit tertinggi justru terjadi di Kota Kediri, yang mencapai

22,22%. Jika di *cluster*-kan menjadi dua maka terdapat 12 daerah dengan tingkat defisit tinggi. Secara rata – rata besarnya defisit daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 7,3%.



Sumber: Diolah dari Tableau Desktop, 2017

Gambar 8. Persentase Penyertaan Modal Daerah Tahun 2010

Persentase penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2010 adalah sebesar 0 sampai dengan 2,8%. Artinya ada beberapa daerah pada tahun 2010 tidak melakukan penyertaan modal, beberapa daerah tersebut di antaranya adalah Banyuwangi, Blitar dan Kabupaten Jember. Sementara itu persentase terbesar adalah Kabupaten Sidoarjo. Rata – rata besarnya persentase penyertaan modal daerah pada tahun 2010 adalah sebesar 0,5% dari total belanja pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2016, rata – rata penyertaan modal sebesar 0,54%, artinya besarnya penyertaan modal dalam kurun waktu 6 tahun hanya mengalami peningkatan sebesar 0,04%.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Rata – rata pertumbuhan pendapatan 38 daerah di Jawa Timur Tahun 2010 – 2016 adalah sebesar 17,35%. Pertumbuhan ini ditopang oleh PAD, dengan rata – rata 27,79%, Dana Perimbangan 18% dan lain – lain pendapatan yang sah 110,%. Struktur pertumbuhan PAD ini, ditopang dengan pertumbuhan pajak daerah 33%, retribusi daerah 11%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 30% dan lain – lain PAD yang sah 68%.

Sedangkan, rata – rata pertumbuhan belanja per-tahunnya adalah sebesar 17,25%. Maksudnya adalah pertumbuhan pendapatan yang diperoleh daerah juga diimbangi dengan pertumbuhan belanja, yang angkanya sedikit lebih kecil dari pendapatannya. Jika dilihat dari struktur belanjanya, maka rata – rata pertumbuhan belanja langsungnya ternyata lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsungnya ini menandakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir daerah – daerah di Jawa Timur semakin berkonsentrasi untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan pada masyarakat dengan dibuktikan semakin besarnya persentase belanja langsung. Sedangkan rata – rata pertumbuhan belanja tidak langsungnya sebesar 13,56%, sedangkan pertumbuhan belanja langsungnya sebesar 26,34% artinya pertumbuhan belanja langsung secara umum lebih besar dibandingkan belanja tidak langsungnya sehingga dari tahun ke tahun pemerintah daerah di Jawa Timur mengalokasikan belanja pembangunannya semakin meningkat. Bahkan ada daerah yang rata rata pertumbuhan belanja langsungnya mencapai 40% yakni Kabupaten Mojokerto.

Besarnya defisit, pada tahun 2010 berada pada rentang Rp 6 M sampai dengan Rp 940 M. Pada tahun ini ada satu daerah yang surplus Rp 3,349 M yakni Kota Blitar. Sedangkan pada tahun 2016, besarnya defisit pada rentang Rp 14 M sampai Rp 941 M. Daerah dengan defisit tertinggi adalah Kota Surabaya. Sedangkan Kabupaten Pasuruan defisit Rp 551 M dan Kabupaten Kediri defisit sebesar 399%. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat defisit terbesar di Jawa Timur.

Sementara itu untuk penyertaan modal, masih ada beberapa daerah yang tidak melakukan penyertaan modal tetapi sebagai besar melakukan penyertaan modal sampai dengan 2,8% dari total belanjanya. Secara umum rata – rata penyertaan modal ini sebesar 0,5%.

## 5.2. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran sebagai hasil dari penelitian ini adalah:

- 1.) Mendorong pertumbuhan PAD yang lebih signifikan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
- 2.) Lain – lain PAD yang sah kontribusinya terhadap PAD semakin besar, sehingga telaah potensi item ini perlu memperoleh perhatian, untuk mengidentifikasi item yang ideal untuk dikembangkan.
- 3.) Perhatian pada anggaran yang defisit ini juga perlu dicermati, untuk semakin meningkatkan kualitas APBD yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Murphy, Sarah Anne. (2013). *Data Visualization and Rapid Analytics: Applying Tableau Desktop to Support Library Decision-Making*, Taylor & Francis Rouledge, 2013.
- Martin, Florence dan Abdou Ndoye. (2016). *Using learning analytics to assess student learning in Online Courses*, Journal of University Teaching & Learning Practice, 2016.
- Hasibuan, Malayu. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Conyers, Diana and Peter Hills. (1984). *An Introduction to Planning in the Third World*. John Wiley and Sons, New York. Comprehensive overview with extensive references on planning approaches, techniques, and organization. Excellent one-volume overview.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.